

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Determinants of Employment in Maluku

Teddy Christiano Leasiwal
Yenni Selanno

**Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
Pada SKPD Provinsi Maluku**

Elna M. Pattinaja

Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit “BR” di Kota Ambon

Lilian S. Loppies

Analisis Kelayakan Investasi Budidaya Rumput Laut di Wilayah KAPET Seram

Johanis Darwin Borolla

**Komoditas Unggulan dan Prospek Pengembangannya
di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)**

Shirley Fredriksz

**Pengaruh Produksi Padi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru**

Ummi Duwila

**Pengaruh Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap
Keterandalan Pelaporan Keuangan
(Studi Pada UKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon)**

James Pelupessy

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Struktural Terhadap
Kesempatan Kerja di Indonesia**

Ramla Dula Saleh

**Keunggulan Sektor dan Pergeseran Struktur Ekonomi
di Kabupaten Maluku Barat Daya**

Vera Paulin Kay

**Pengaruh Dimensi Kolaborasi *Supply Chain* Terhadap Kepercayaan Antar-Organisasi
Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Operasi**

Zainuddin Latuconsina

**Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Kontribusi Sektor Perkebunan Serta
Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Maluku**

Abdul Azis Laitupa

**Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Upah Terhadap Pertumbuhan
Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Maluku**

Terezia V. Pattimahu

CE	Vol. IX	No. 2	Halaman 106 - 211	Ambon Desember 2015	ISSN 1978-3612
----	---------	-------	----------------------	------------------------	-------------------

**PENGARUH BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP KONTRIBUSI SEKTOR
PERKEBUNAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEMPATAN KERJA SEKTOR
PERTANIAN DI PROVINSI MALUKU**

Abdul Azis Laitupa

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura
Jln. Ir. M. Putuhena, Kode Pos : 97233 Ambon
nyongazis@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of indirect expenditure to the contribution of the plantation sector and its impact on employment in the agricultural sector districts in the province of Maluku.

The data of this research used secondary data in the form of time series and cross section (panel data), covering eight districts in the province of Maluku 2005-2009. The analysis technique in this study used Path Analysis through Model Partial Least Square (PLS).

The results showed that the indirect expenditure is positive and significant impact on the contribution of the plantation sector. The results also showed that the contribution of the plantation sector is positive and significant impact on employment as the agricultural sector.

Keywords: *indirect expenditures, contributions plantation sector employment as the agricultural sector*

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan patut menjadi sektor andalan dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi karena sektor pertanian menjadi tumpuan hidup (pekerjaan primer) bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Sektor pertanian juga menjadi sumber pangan publik, menempati posisi penting sebagai penyumbang devisa yang relatif besar dan cukup lentur dalam menghadapi gejala moneter dan krisis ekonomi, oleh karena produksinya berbasis pada sumber daya domestik maka ekspor produk pertanian relatif lebih tangguh dan relatif stabil dengan penerimaan ekspor yang meningkat pada saat terjadi krisis ekonomi.

Lebih dari itu sektor pertanian memiliki keunggulan khas dari sektor-sektor lain dalam perekonomian Nasional, antara lain: produksi pertanian berbasis pada sumberdaya domestik, kandungan impornya rendah dan relatif lebih tangguh menghadapi gejala perekonomian eksternal. Berarti upaya mempertahankan dan meningkatkan peranan sektor pertanian merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan ketahanan perekonomian Nasional. Hal ini terbukti dari fakta empiris, disaat Indonesia menghadapi krisis dan secara nasional mengalami laju pertumbuhan ekonomi negatif, hanya sektor pertanian

yang tumbuh positif, yaitu 5,32% pada triwulan I tahun 1998 (Solahuddin, 2009).

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama dari penduduknya. Kenyataan yang terjadi bahwa sebagian besar lahan di wilayah Indonesia diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan hampir 50% dari total angkatan kerja masih menggantungkan nasibnya bekerja di sektor pertanian (Dillon, 2004). Selain itu, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menghasilkan input atau bahan baku bagi proses industrialisasi. Keadaan seperti ini menuntut bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia harus dilandaskan pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Dengan demikian, sektor pertanian masih tetap akan berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Belajar dari pengalaman masa lalu dan kondisi yang dihadapi saat ini, sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional. Sektor pertanian haruslah diposisikan sebagai sektor andalan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, di mana salah satunya adalah Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan.

Kesempatan kerja didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha memberi pekerjaan atau penghidupan yang layak kepada seseorang. Kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lowongan pekerjaan yang belum diisi. Gambaran mengenai kesempatan kerja adalah dengan menggunakan data sensus penduduk, jumlah penduduk yang bekerja, biasa dipandang mencerminkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Dalam hal ini kesempatan kerja bukanlah lapangan kerja yang masih terbuka, walaupun komponen terakhir ini akan menambah kesempatan kerja yang ada di waktu yang akan datang.

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Anaman, 2004).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah menuntut adanya suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah sendiri, upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan pada kondisi tertentu saja, karena secara umum upaya tersebut justru dapat meningkatkan beban yang harus ditanggung masyarakat. Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian utama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja langsung karena diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun, namun peningkatan tersebut belum dibarengi dengan pengurangan laju pengangguran. Padahal pada umumnya jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka tenaga kerja yang terserap oleh sektor-sektor ekonomi akan meningkat, sehingga laju pengangguran menurun atau berkurang.

Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara

pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Tingginya kesempatan kerja akan berpengaruh terhadap pencapaian ekonomi suatu daerah. Alasannya, kegiatan ekonomi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kinerja produksi masyarakat yang biasanya di cerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara makro, laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja melalui elastisitas kesempatan kerja, dimana elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini akan menguji pengaruh belanja tidak langsung terhadap kontribusi sektor perkebunan serta dampaknya terhadap kesempatan kerja sektor pertanian di Provinsi Maluku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja

Alokasi pengeluaran pemerintah dalam APBD di Provinsi Maluku yang ditujukan sebagai fungsi pelayanan dan memperkuat struktur ekonomi daerah tersebar dalam sektor-sektor pembangunan yang dikelompokkan dalam tiga bagian, yakni bagian ekonomi, bagian sosial budaya, dan bagian fisik prasarana. Di dalam sektor-sektor pembangunan tersebut alokasi pembangunan yang dijabarkan dalam berbagai program dan proyek pembangunan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian daerah yang sasarannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan perluasan lapangan kerja.

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Guritno, 2001), yang menghubungkan perkembangan pengeluaran dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahapan menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan infrastruktur atau prasarana seperti antara lain prasarana transportasi, perhubungan, pertanian, industry dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas.

Myrdal dalam Sukirno (1997), menyatakan bahwa apabila pemerintah tidak secara aktif campur tangan didalam kegiatan ekonomi, tingkat pembangunan

yang berbedadi antara berbagai daerah akan memberikan akibat buruk pada corak pembangunan yang selanjutnya disebutkan dengan istilah *Backwash Effects*. Namun demikian daerah yang lebih kaya dapat pula menimbulkan pengaruh yang menguntungkan bagi daerah yang lebih miskin untuk mengadakan pembangunan yang lebih cepat. Pengaruh ini disebutkan dengan istilah *Spread effect*.

Pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, dimana belanja langsung adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. Belanja langsung terdiri dari belanja administrasi umum yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan, belanja operasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Sedangkan belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah anggaran belanja langsung untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja publik, belanja aparatur, dan pengeluaran transfer.

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – propinsi – daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi (Lee Robert, Jr and Ronald W. Johnson, 1998). Oleh karena itu dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari kebijakan makroekonomi yang bertujuan agar tercapainya kestabilan ekonomi yang lebih mantap, artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau kestabilan harga-harga

umum di lain pihak. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang penerimaan dan pengeluarannya dengan tujuan menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.

Dalam perkembangannya kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni: (1) Pembiayaan fungsional dimana pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja (*employment*). Di lain pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana tersedia dalam masyarakat. Apabila pajak maupun pinjaman dirasa tidak tepat, maka ditempuh pencetakan uang; (2) Pengelolaan Anggaran, dimana hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dengan perpajakan selalu dipertahankan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan anggaran belanja seimbang untuk jangka panjang diperlukan dengan catatan bahwa dalam masa depresi (perekonomian lesu) ditempuh anggaran belanja defisit sedangkan dalam masa inflasi ditempuh anggaran belanja surplus; (3) Stabilitas Anggaran Otomatis Penyesuaian secara otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga membawa perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Dengan stabilisasi, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program, dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh; dan (4) Anggaran Belanja Seimbang merupakan gabungan dari dua jenis anggaran di atas, yaitu anggaran yang disesuaikan dengan keadaan pengelolaan anggaran.

Masalah dan Faktor Penentu Kesempatan Kerja

Dalam suatu perekonomian secara keseluruhan, kesempatan kerja tergantung dari pada keputusan semua pengusaha individual, pengusaha tersebut berupaya untuk menentukan berapa banyak pekerja yang dipekerjakan guna memperoleh keuntungan yang maksimal.

Soeroto (1986 :32), menyatakan bahwa lapangan usaha atau kesempatan kerja yang ada dalam masyarakat terbagi dua yakni 1) Kesempatan kerja yang sudah diduduki atau penggunaan tenaga kerja. 2), kesempatan kerja yang belum diduduki atau masih lowong. Dengan demikian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan yang masih lowong. Dari yang masih lowong

tersebut (mengandung arti adanya kesempatan) timbul kemudian kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara riil dipergunakan untuk perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat kerja tertentu, melalui advertensi dan lain-lain, kemudian dinamakan lowongan.

Keynes dalam bukunya yang berjudul “*The General Theory of Employment, Interest and Money*” dalam Winardi (1985 :45) mengemukakan bahwa para perusahaan individual, kesempatan kerja tergantung pada keputusan para pengusaha berapa banyak pekerja yang dipekerjakan guna mencapai laba maksimum. Kemudian Keynes juga mengatakan bahwa, elastisitas permintaan tenaga kerja ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain misalnya modal, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi, elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya.

Menurut Squire (1982 :75), dinegara-negara berkembang sebagian besar kesempatan kerja masih berada pada sektor pertanian, sedangkan yang berada di sektor industri masih kurang. Selanjutnya dikatakan bahwa sektor industri dinegara-negara berkembang mempunyai daya serap tenaga kerja yang kurang memadai, yang berarti bahwa dari pertambahan angkatan kerja yang ada hanya merupakan suatu presentase yang kecil dalam memperoleh pekerjaan di sektor industri, dan sisanya terpaksa menerima pekerjaan pada sektor pertanian dan jasa.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series dan cross section (data panel), meliputi delapan kabupaten kota di Provinsi Maluku periode tahun 2005-2009. Kabupaten yang dimekarkan dalam kurun waktu periode penelitian, tidak dimasukan sebagai sampel penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku serta instansi lainnya yang mendukung penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Jalur dengan Model *Partial Least Square* (PLS). *Partial Least Square* (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Herman Wold (1975) dalam Yamin dan Kurniawan (2011). PLS merupakan model analisis yang *powerful* karena dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval dan rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS dapat juga dikatakan sebagai metode pendekatan PLS

untuk pemodelan persamaan struktural. Dalam komunitas PLS, istilah “*Path Modeling*” lebih disukai daripada *Structural Equation Modeling*. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam literatur PLS.

PLS tidak mengasumsikan data harus mengikuti suatu distribusi tertentu, misal berdistribusi normal. Pendekatan PLS merupakan *distribution free* serta ukuran sampel yang fleksibel. PLS dapat juga digunakan ketika landasan teori model adalah tentatif atau pengukuran setiap konstruk laten masih baru (Yamin dan Kurniawan, 2011). PLS berbasis varian yang didesain dengan tujuan prediksi. Hal ini menjadi konsep awal yang harus menjadi landasan bagi para peneliti. Fokus utama dari PLS adalah memaksimalkan varian konstruk endogen yang mampu dijelaskan oleh konstruk eksogen atau mengidentifikasi konstruk yang mampu memaksimalkan kekuatan prediksi model.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Tidak Langsung Pemerintah terhadap Kontribusi Sektor Perkebunan

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa, apabila belanja tidak langsung meningkat 1 persen, akan meningkatkan kontribusi sektor perkebunan sebesar - 0,007 persen dengan nilai absolut sebesar 0.421, dengan kata lain pengaruh belanja tidak langsung terhadap kontribusi sektor perkebunan positif dan signifikan.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesa awal yang menyatakan bahwa bahwa belanja tidak langsung berpengaruh secara positif terhadap kontribusi sektor perkebunan. Hal ini disebabkan karena belanja tidak langsung mempunyai dampak langsung terhadap kontribusi sektor perkebunan pada tahun yang sama.

Belanja tidak langsung mempunyai dampak langsung terhadap kontribusi sektor perkebunan yang tinggi apabila belanja langsung di pusatkan pada pembelanjaan publik. Secara teoritis (Wagner) dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang meningkat disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbal balik dalam masyarakat dimana salah satu tujuan utama dari pengeluaran pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak terhadap penurunan kemiskinan melalui distribusi pendapatan dan rata-rata pengeluaran.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis 1

Latent Variable	Value	Standard Error	t	Pr > t
Belanja Tidak Langsung	0,421	0,147	2,87	0,007

Sumber: data diolah

Pengaruh Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa, apabila kontribusi sektor perkebunan meningkat 1 persen, akan meningkatkan kesempatan kerja sektor pertanian sebesar 0,000 persen dengan nilai absolut sebesar 0.709, dengan kata lain pengaruh kontribusi sektor perkebunan terhadap kesempatan kerja sektor pertanian positif dan signifikan.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesa awal yang menyatakan bahwa kontribusi sektor perkebunan berpengaruh secara positif terhadap kesempatan kerja sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena kontribusi sektor perkebunan mempunyai dampak langsung terhadap kesempatan kerja sektor pertanian pada tahun yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa

sektor perkebunan di Provinsi Maluku dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja pada sektor pertanian. Dimana dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara langsung akan berdampak terhadap kesempatan kerja secara umum dan khususnya untuk kesempatan kerja sektor pertanian.

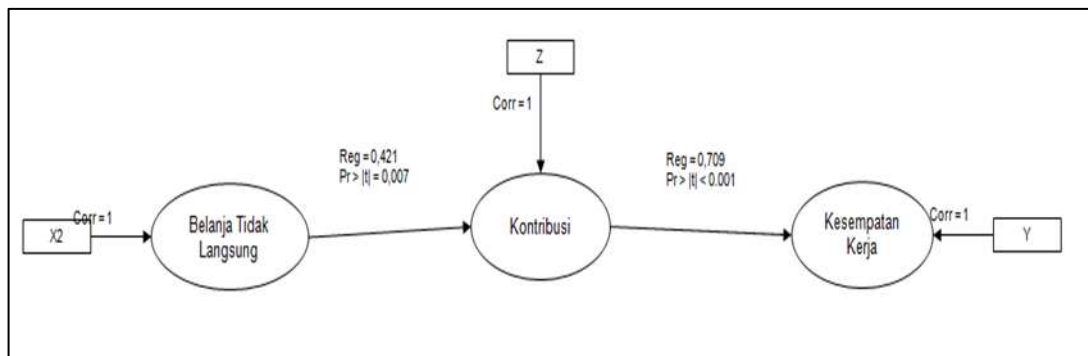
Kontribusi sektor perkebunan mempunyai dampak langsung terhadap kesempatan kerja sektor pertanian, Secara teoritis dijelaskan bahwa kontribusi sektor perkebunan yang meningkat akan berdampak terhadap penambahan tenaga kerja disektor pertanian, dimana secara langsung sub sektor perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis 2

Latent Variable	Value	Standard Error	t	Pr > t
Kontribusi	0,709	0,114	6,200	0,000

Sumber: data diolah

Model Hasil Penelitian

**Gambar 1.** Hasil Penelitian

V. PENUTUP

a) Kesimpulan

- 1) Belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontribusi sektor perkebunan. Hasil ini memberikan indikasi bahwa penambahan belanja tidak langsung Pemda Provinsi Maluku dapat meningkatkan kontribusi sektor perkebunan di Provinsi Maluku..
- 2) Kontribusi sektor perkebunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja sektor pertanian. Hasil ini memberikan indikasi bahwa penambahan kontribusi sektor perkebunan Pemda Provinsi Maluku dapat meningkatkan kesempatan kerja sektor pertanian di Provinsi Maluku.

REFERENSI

- Agus. (2001). *Analisis Struktural Kesempatan Kerja di Indonesia sebelum dan sesudah Krisis Moneter*. Makalah Ilmiah Falsafah Sains, Program Pascasarjana Program Doktorat Ilmu Ekonomi. IPB. Bogor.
- Arsyad, Lincoln, (1997), *Ekonomi Pembangunan*, Widya Sarana Informatika, Yogyakarta.
- BPS, (2009). *Maluku dalam Angka*, Badan Pusat statistik Provinsi Maluku.
- Boediono, (1981), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Dumairy, (1996), *Perekonomian Indonesia*, Erlangga Jakarta.
- Jhingan M.L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafiika Persada, Jakarta.

- Munif, Abdul.** (2009). *Strategi dan Pencapaian Swasembada Pangan di Indonesia*,
- Prijono, A & Aris Tjiptoherijanto,** (1985) “*Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia*” Sinar Harapan, Jakarta.
- Pudji, Astuti Utami.** (2002). *Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi. Program Pascasarjana*. IPB. Bogor.
- Rusastra, I Wayan dan M. Suryadi.** (2004). Ekonomi Tenaga Kerja Pertanian dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Tani. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*. Vol. 23 (3). Bogor.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus,** (1996). *Makro Ekonomi* (terjemahan), Edisi Keempatbelas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sinaga, Azvir.** (2005). *Analisis Kesempatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara*. Program Pascasarjana Megister Ekonomi Pembangunan. USU. Medan.
- Siregar, H. dan Tatan Sukwika.** (2006). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pasar Tenaga Kerja dan Implikasi Kebijakannya terhadap Sektor Pertanian di Kabupaten Bogor. *Jurnal PWD*. IPB. Bogor.
- Suparmoko,** (1990), *Pengantar Ekonomi Makro*, BPFE, UGM, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus.** (2006). *Apakah Pertumbuhan di Sektor Pertanian sangat Krusial bagi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia ?*. Kadin Indonesia-Jetro (2006). <http://kadin-indonesia.or.id>.
- Todaro, Michael.** (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004.